PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA

Neisty Pratiwi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: neisty98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran pemilu di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pemilu. Demokrasi di Indonesia, yang menjadi pilar utama kedaulatan rakyat dan kesejahteraan negara, sering kali diliputi oleh dinamika politik yang memperburuk potensi konflik, seperti politik uang dan kampanye hitam. Kewenangan Bawaslu, yang mencakup aspek pencegahan hingga penegakan hukum, sering kali terhambat oleh berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan ketidaksinkronan regulasi. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi tantangan dalam hal eksekusi rekomendasi, pengawasan di daerah terpencil, serta implementasi regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif dalam menangani pelanggaran kompleks. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Bawaslu dan memberikan rekomendasi untuk penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika politik dan teknologi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi Bawaslu dan upaya untuk memperkuat peranannya dalam mewujudkan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas.

Kata Kunci: Pengawasan Pemilu, BAWASLU, Penegakan Hukum Pemilu.

Abstract

This study examines the authority of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in handling election violations in Indonesia, focusing on the challenges and obstacles faced in implementing election supervision, prevention, enforcement, and dispute resolution. Democracy in Indonesia, a key pillar of popular sovereignty and national welfare, is often beset by political dynamics that exacerbate potential conflicts, such as money politics and smear campaigns. Bawaslu's authority, which spans aspects of prevention and law enforcement, is often hampered by various obstacles, including limited human resources, supporting facilities, and regulatory asymmetry. Bawaslu Regulation Number 3 of 2023 concerning the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) is a strategic step in strengthening coordination

between Bawaslu, the police, and the prosecutor's office. However, Bawaslu still faces challenges in terms of executing recommendations, oversight in remote areas, and implementing regulations that are not yet fully comprehensive in handling complex violations. Using a normative juridical approach, this study analyzes the laws and regulations governing Bawaslu's authority and provides recommendations for strengthening institutional capacity, enhancing inter-agency coordination, and adapting regulations to be more responsive to political and technological dynamics. The results are expected to provide a clear picture of the challenges Bawaslu faces and efforts to strengthen its role in realizing more democratic and integrity-based elections.

Keywords: *Election Supervision, BAWASLU, Election Law Enforcement.*

A. PENDAHULUAN

Sistem Persoalan dinamika politik di Indonesia sering kali digunakan dengan pendekatan *trush* isu etnis, identitas, budaya bahkan yang bermuara pada konflik antar masyarakat, dan pemegang kekuasaan¹. Hal ini, yang mencerminkan pemilu menjadi kekhawatiran dimasa depan dengan demokrasi yang tidak sejalan dengan instrumen politik maupun prinsip-prinsip demokrasi². Demokrasi di Indonesia dinilai sebagai salah satu pilar utama yang mewujudkan kedaulatan rakyat bahkan kesejahteraan negara (*welfare state*)³. Dinamika ini menjadi ruang dan celah penyalahgunaan aturan atau regulasi yang ketidaksesuaian⁴. Maka dari itu, pengawasan pemilu seperti Bawaslu perlunya memperhatikan peran krusial sebagai pengawas sekaligus penegak hukum pemilu, dikarenakan kewenangan ini meliputi pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pemilu dengan melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam satu koordinasi

Kewenangan yang dimiliki Bawaslu sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utamanya adalah kompleksitas pelanggaran pemilu yang terus berkembang. Misalnya, praktik politik uang dan kampanye hitam masih menjadi masalah besar yang sulit ditangani secara efektif. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga memperparah keadaan, sehingga mengurangi kemampuan Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang optimal. Selain itu, ada permasalahan dalam hal eksekusi rekomendasi Bawaslu. Dalam banyak kasus, Bawaslu hanya dapat memberikan

¹ Noory Okthariza, "Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State of in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1742957>.

² Kholida Qothrunnada, "Good Governance : Pengertian Dan Prinsip-Prinsipnya," web page, 2021.

³ S. Dahlberg, "Political Participation and the Welfare State: The Inclusion of Marginalized Groups in Political Processes," *European Journal of Political Research*. 59, no. 2 (2020): 396–411.

⁴ Sainul Rahman, "Tensions of The Tension of Sectarianism and the Challenges of Democracy in the Middle East After Arab Spring," *Jurnal ICMES* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i1.32>.

rekomendasi kepada instansi lain, seperti Kepolisian atau Kejaksaan, tanpa memiliki kewenangan langsung untuk menindak pelaku pelanggaran. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang independen. Dari sudut pandang yuridis, perlu dikaji lebih lanjut apakah peraturan yang ada sudah cukup untuk mengakomodasi kebutuhan pengawasan yang efektif. Bawaslu dihadapkan pada tantangan regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif dalam menangani pelanggaran tertentu, seperti pelanggaran administrasi yang bersifat kompleks atau pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi serta penyesuaian terhadap dinamika politik dan teknologi yang terus berkembang.

Di samping itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran pemilu menunjukkan adanya kerangka hukum yang terus berkembang⁵, tidak hanya peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu melainkan melibatkan fungsi pengawasan pasif, tetapi juga mencakup fungsi pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pemilu⁶. Sebagaimana kewenangan Bawaslu di Indonesia memiliki dimensi yang kompleks, mencakup pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, hingga potensi pidana pemilu⁷. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait koordinasi antar-lembaga, ketidaksinkronan regulasi, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten⁸.

Selain itu, kewenangan Bawaslu dalam konteks penegakan hukum pemilu memerlukan penguatan pada aspek legislasi⁹. Kelemahan pada beberapa regulasi seperti Undang-Undang Pemilu membuat posisi Bawaslu sering kali terbatas dalam menghadapi kasus-kasus kompleks, khususnya yang bersifat pidana¹⁰. Dalam hal ini, kolaborasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan menjadi penting untuk memastikan pelanggaran pemilu dapat ditangani secara tuntas¹¹. Sementara itu, perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu melalui pelatihan teknis, penguatan teknologi informasi, dan reformasi struktural.

⁵ Dwi Irawan, I Gusti Agung Ngurah Agung, and Resi Pranacitra, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum," *POSTULAT 2*, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460>.

⁶ Jonasmer; Muhammad Subekhan Simatupang, "Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Unnes* 4, no. 3 (2018).

⁷ Khoiril Padilah and Irwansyah Irwansyah, "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29210/1202322821>.

⁸ Surahman Surahman et al., "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348>.

⁹ Diding Rahmat and Anthon Fathanudien, "Law Enforcement of Election Crimes in Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i2.5074>.

¹⁰ La Ode Hamzah, Ali Rizky, and Kamaruddin, "TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA," *Journal Publicuho* 6, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342>.

¹¹ Ida Farida, "MAHAR POLITIK DALAM PANDANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.25157/jigi.v7i1.2137>.

Di sisi lain, kekhawatiran dalam proses pemilu banyak mengkritisi implementasi kewenangan Bawaslu yang cenderung bersifat reaktif dibandingkan proaktif¹². Dikarenakan Bawaslu sering kali terjebak pada pola penanganan pelanggaran yang bersifat formalistik tanpa diiringi upaya pencegahan yang sistematis¹³. Institusi ini menjadi salah satu disoroti saat ditahun politik, sebab itu kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif diperluas, mengingat mayoritas pelanggaran dalam pemilu cenderung berada pada ranah administratif dibandingkan pidana¹⁴.

Secara keseluruhan, kewenangan Bawaslu sebagai institusi yang menghidupkan ruang struktural, tetapi fungsional menegaskan perlu kesesuaian regulasi kelembagaan, peningkatan kapasitas lintas sektor menjadi poin utama yang harus diperhatikan untuk memastikan Bawaslu mampu menjalankan perannya secara efektif¹⁵. Namun, pengawasan pemilu di Indonesia juga dapat dibandingkan dengan praktik di negara lain. Beberapa negara memberikan kewenangan yang lebih besar kepada lembaga pengawas pemilu, seperti kemampuan untuk memberikan sanksi langsung atau kewenangan penuh dalam penyelesaian sengketa pemilu¹⁶. Hal ini, menunjukkan bahwa Bawaslu memerlukan penguatan, baik dalam aspek regulasi maupun kapasitas kelembagaan, agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif. Melihat berbagai tantangan yang dihadapi, penting untuk menakar sejauh mana kewenangan Bawaslu efektif dalam menangani pelanggaran pemilu. Dengan demikian, upaya menakar kewenangan Bawaslu bukan hanya berfokus pada dimensi hukum, tetapi juga pada aspek implementasi yang mencakup pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu. Kajian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai tantangan yang dihadapi Bawaslu serta memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif¹⁷, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang mengatur kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran pemilu. Pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana hukum

¹² Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.

¹³ Hendra Setyadi Kurnia Putra, "GRAND DESIGN PERADILAN KHUSUS PEMILU DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24269/lh.v3i1.3109>.

¹⁴ Sofian, "POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM RANGKA PENEKAKAN HUKUM PEMILU," *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56854/jhdn.v1i1.43>.

¹⁵ Juhardin Juhardin and Adhe Ismail Ananda, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i1.908>.

¹⁶ Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Pustaka Pelajar Dan Insict*, 1999.

¹⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ctk. Kelima, Sinar Grafika., 2014).

positif, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023, mengatur tugas dan kewenangan Bawaslu. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Bawaslu, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui interpretasi hukum untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Bawaslu. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi terkait penguatan kewenangan Bawaslu, khususnya dalam meningkatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya serta memperbaiki aspek regulasi dan kapasitas kelembagaan.

C. PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan yang signifikan dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Kewenangan ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sebagai lembaga yang bertugas memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi, Bawaslu menjalankan peran strategis dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang, kampanye hitam, dan pelanggaran administratif lainnya.¹⁸

Dalam konteks teori hukum, kewenangan Bawaslu dapat dianalisis melalui pendekatan teori positivisme hukum dan teori hukum progresif. Dari sudut pandang positivisme hukum, kewenangan Bawaslu bersumber dari aturan tertulis yang jelas, seperti Undang-Undang Pemilu dan peraturan terkait lainnya. Hal ini memberikan legitimasi dan dasar hukum bagi Bawaslu untuk menjalankan fungsi pencegahannya. Namun, teori ini juga menunjukkan adanya keterbatasan, karena aturan hukum cenderung bersifat rigid dan kurang responsif terhadap dinamika pelanggaran yang terus berkembang. Sebaliknya, teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menawarkan pendekatan yang lebih dinamis. Teori ini menekankan bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam konteks ini, Bawaslu perlu mengedepankan langkah-langkah preventif yang inovatif, seperti edukasi pemilih, peningkatan literasi politik, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi pelanggaran secara dini. Pendekatan ini dapat memperkuat peran Bawaslu sebagai pengawal demokrasi yang tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan budaya politik yang sehat.

Bawaslu mengimplementasikan kewenangannya melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran pemilu. Misalnya, penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat luas, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Selain itu, Bawaslu juga aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas kampanye, verifikasi data pemilih, dan peninjauan regulasi pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu

¹⁸ Sarah Furqoni, Sahbudi Sahbudi, and Annisa Danti Avrilia Ningrum, 'Politik Hukum Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum', *Jatijajar Law Review*, 1.1 (2022), hlm, 11 .

bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, media massa, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan pemilu yang kondusif dan bebas dari pelanggaran.¹⁹ Namun, tantangan dalam pencegahan pelanggaran pemilu tidak dapat diabaikan. Kompleksitas regulasi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pencegahannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas teknis Bawaslu untuk menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, sinergi antara Bawaslu dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga harus terus ditingkatkan untuk memastikan efektivitas pencegahan pelanggaran pemilu.

Kewenangan Bawaslu dalam Penindakan Pelanggaran Pemilu

Kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran pemilu mencakup serangkaian langkah yang diawali dengan investigasi, pengumpulan bukti, hingga pemberian rekomendasi kepada lembaga terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, proses ini diawali dengan penerimaan laporan atau temuan langsung di lapangan. Bawaslu kemudian melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang terlibat serta melakukan investigasi untuk memastikan validitas laporan. Dalam konteks tindak pidana pemilu, Bawaslu bekerja melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk mempercepat penanganan perkara. Setelah bukti-bukti terkumpul dan analisis hukum dilakukan, Bawaslu memberikan rekomendasi yang dapat berupa tindak lanjut administratif, seperti pembatalan pencalonan atau peringatan kepada peserta pemilu. Untuk pelanggaran yang bersifat pidana, rekomendasi disampaikan kepada kepolisian atau kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tahapan ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu tidak hanya berhenti pada pengawasan, tetapi juga memastikan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

Meskipun proses penindakan sudah memiliki kerangka kerja yang jelas, Bawaslu sering kali menghadapi kendala dalam koordinasi dengan lembaga terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan persepsi dalam menilai bukti atau unsur pelanggaran. Dalam beberapa kasus, rekomendasi Bawaslu tidak diikuti dengan tindakan yang memadai oleh lembaga lain, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum pemilu. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga menjadi hambatan dalam penanganan pelanggaran pemilu yang kompleks. Misalnya, Bawaslu sering kali kesulitan dalam mengawasi pelanggaran di daerah terpencil atau yang melibatkan teknologi informasi, seperti kampanye hitam di media sosial. Koordinasi lintas sektor memerlukan pembagian tugas yang lebih jelas serta penguatan kapasitas kelembagaan di semua level.

¹⁹ H.M. Wasikin Marzuki, 'Problematika Sdm Pengawas Pemilu Dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024', *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2.1 (2022), hlm, 57-66 .

²⁰ Bakhrul Amal, 'Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018)', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.3 (2019), hlm, 306 .

Dalam hal penegakan pidana pemilu, mekanisme Gakkumdu bertujuan untuk mengintegrasikan tugas dan fungsi Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali terhambat oleh birokrasi dan kurangnya keselarasan regulasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi kebijakan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Bawaslu, terutama dalam hal menindak langsung pelanggaran administratif yang memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilu.

Tantangan Kewenangan Bawaslu

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bawaslu adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukung dalam melaksanakan kewenangannya. Banyaknya jumlah daerah pemilihan dan kompleksitas proses pemilu memerlukan pengawas yang kompeten dan berjumlah memadai. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Bawaslu sering kali kekurangan SDM yang terlatih dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran pemilu. Keterbatasan sarana, seperti teknologi pendukung untuk pemantauan kampanye digital atau transportasi ke daerah terpencil, juga menjadi kendala yang signifikan.²¹

Ketidaksinkronan regulasi antara Bawaslu dan lembaga terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan, sering kali menghambat proses penanganan pelanggaran pemilu. Misalnya, perbedaan interpretasi mengenai wewenang atau tahapan prosedur dapat menunda proses investigasi dan penindakan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam kerangka hukum yang mengatur hubungan antarlembaga, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi yang memberikan kewenangan lebih jelas dan terintegrasi kepada Bawaslu. Regulasi ini harus mencakup pembagian tugas yang rinci antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan online dan analitik data, dapat membantu Bawaslu dalam mendeteksi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan alokasi anggaran yang memadai juga menjadi kunci untuk memperkuat peran Bawaslu dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Kelemahan Regulasi dan Kebutuhan Penguatan Legislasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu, kewenangan Bawaslu sangat menentukan keberhasilan pemilu yang jujur dan adil. Namun, Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini masih membatasi kewenangan Bawaslu dalam beberapa aspek, sehingga menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.²² Beberapa pembatasan kewenangan Bawaslu yang dapat ditemukan dalam regulasi saat ini antara lain adalah keterbatasan dalam menangani pelanggaran administratif dan pidana pemilu. Dalam hal pelanggaran administratif, Bawaslu

²¹ Agung Prayogo, 'Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11.3 (2022), hlm, 246-260 .

²² Syafrijal Mughni Mada, Firdaus Firdaus, and Mirdedi Mirdedi, 'Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Dan DKPP Dalam Penegakan Hukum Pemilu', *Jurnal Konstitusi*, 19.4 (2022), hlm, 909- 932 .

hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, untuk pelanggaran pidana, meskipun Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi, penindakan pidana sering kali bergantung pada aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang kurang optimal dalam respons terhadap laporan Bawaslu.

Selain itu, regulasi yang ada juga memberikan ruang terbatas bagi Bawaslu dalam melakukan tindakan preventif. Misalnya, meskipun Bawaslu dapat mendeteksi potensi pelanggaran, namun kewenangan mereka dalam mengambil langkah-langkah preventif sering kali dibatasi oleh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu. Akibatnya, Bawaslu lebih sering berfokus pada tindak lanjut setelah pelanggaran terjadi, yang tentunya mengurangi efektivitas dalam menciptakan pemilu yang bebas dari pelanggaran. Penguatan regulasi untuk menangani pelanggaran administratif dan pidana pemilu secara komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan integritas pemilu dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilihan. Undang-Undang Pemilu saat ini, meskipun sudah memiliki dasar hukum yang jelas, masih banyak kekurangan dalam hal penguatan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum oleh Bawaslu. Untuk pelanggaran administratif, penguatan regulasi diperlukan agar Bawaslu tidak hanya sekadar memberikan rekomendasi, tetapi juga memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat. Misalnya, dalam hal pelanggaran aturan kampanye atau distribusi logistik pemilu yang tidak sesuai, Bawaslu dapat diberi kewenangan untuk langsung memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar tanpa harus bergantung pada keputusan KPU atau instansi lain. Hal ini akan mempercepat penanganan pelanggaran dan mengurangi ruang bagi pihak yang melanggar untuk menghindar dari sanksi.

Di sisi lain, untuk pelanggaran pidana pemilu, perlu ada penguatan regulasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Bawaslu dalam hal penyelidikan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Salah satu kelemahan yang ada saat ini adalah kurangnya sistem yang mengintegrasikan Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penanganan pelanggaran pidana secara lebih efektif. Sebagai contoh, pelanggaran seperti money politics atau politik uang sering kali sulit dibuktikan tanpa bukti yang kuat. Bawaslu perlu memiliki kewenangan lebih dalam mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi awal, serta berkoordinasi lebih intens dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran pidana dapat diproses secara cepat dan transparan.²³

Selain itu, penguatan regulasi juga harus mencakup perlunya harmonisasi antara Undang-Undang Pemilu dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya regulasi yang komprehensif dan saling mendukung, pengawasan terhadap pelanggaran administratif dan pidana dapat dilakukan secara lebih efisien dan tidak

²³ Surahman Surahman and others, 'Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan', *Jurnal Usm Law Review*, 6.3 (2023), hlm, 1005 .

terbatas hanya pada tingkat pemilu saja. Kelemahan regulasi dalam Undang-Undang Pemilu yang membatasi kewenangan Bawaslu menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu. Untuk itu, penguatan legislasi sangat penting guna menangani pelanggaran administratif dan pidana pemilu secara lebih komprehensif. Penguatan kewenangan Bawaslu, baik dalam hal penyelidikan pelanggaran administratif maupun pidana, akan membantu menciptakan pemilu yang lebih bersih, adil, dan demokratis. Selain itu, harmonisasi regulasi yang lebih baik antara Undang-Undang Pemilu dengan peraturan lainnya akan memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu di Indonesia.

Implementasi Kewenangan Bawaslu: Reaktif vs. Proaktif

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memainkan peran penting dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Namun, selama ini, Bawaslu cenderung mengadopsi pendekatan reaktif dalam penanganan pelanggaran pemilu, yang berfokus pada pengawasan setelah pelanggaran terjadi. Pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan signifikan, seperti waktu respons yang lambat, terbatasnya ruang untuk tindakan preventif, dan kesulitan dalam menangani pelanggaran yang kompleks atau sistemik. Ketika Bawaslu baru bertindak setelah pelanggaran terjadi, misalnya dalam hal kampanye yang melanggar aturan atau politik uang, hal ini tidak hanya memperlambat proses penindakan, tetapi juga merusak kredibilitas pemilu yang sudah berlangsung.²⁴

Untuk itu, penting bagi Bawaslu untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih sistematis dan proaktif dalam pengawasan pemilu. Pendekatan proaktif akan memungkinkan Bawaslu tidak hanya bertindak setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mencegah pelanggaran sebelum mereka terjadi. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memperkuat pemantauan dini dan deteksi pelanggaran potensial sejak tahap awal pemilu, misalnya melalui penggunaan teknologi informasi untuk memantau kampanye, distribusi logistik, dan dana kampanye secara real-time. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai aturan pemilu kepada peserta dan publik juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemilu yang bersih, yang dapat mengurangi potensi pelanggaran.

Pencegahan pelanggaran juga akan lebih efektif dengan peningkatan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan instansi penegak hukum lainnya. Melalui kolaborasi yang baik, potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani dengan cepat. Selain itu, pengembangan sistem pengaduan yang lebih efektif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan potensi pelanggaran dengan aman dan mudah. Dengan cara ini, Bawaslu dapat melakukan tindakan preventif lebih efektif. Penguatan strategi pencegahan ini, termasuk penyusunan rencana aksi pencegahan di setiap tahapan pemilu, akan menjadikan pemilu lebih adil dan transparan. Oleh karena itu, pengawasan pemilu perlu beralih dari sekadar reaktif menjadi lebih proaktif untuk memastikan integritas dan kredibilitas pemilu di Indonesia.

²⁴ Faramadinah Rahmiz and H. M. Yasin, 'Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24.1 (2021), hlm, 163-187 .

D. PENUTUP

Kesimpulan

Dinamika politik di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh isu etnis, identitas, dan budaya yang dapat memicu konflik masyarakat serta penyalahgunaan kekuasaan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi di masa depan. Dalam konteks pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial sebagai pengawas sekaligus penegak hukum pemilu untuk memastikan prinsip demokrasi dan keadilan terpenuhi. Bawaslu menjalankan kewenangan pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pemilu yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023. Namun, pelaksanaan kewenangan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik politik uang, kampanye hitam, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sinkronisasi regulasi, serta keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi langsung. Kolaborasi antar-lembaga melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi langkah penting dalam menangani pelanggaran pemilu, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan.

Bawaslu juga dihadapkan pada tantangan internal, seperti pola pengawasan yang cenderung reaktif dibanding proaktif, serta keterbatasan teknologi untuk memantau pelanggaran di era digital. Di sisi lain, penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas teknis, reformasi struktural, dan revisi regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Sebagai lembaga pengawal demokrasi, Bawaslu perlu mengadopsi pendekatan progresif yang mengutamakan pencegahan melalui edukasi pemilih, peningkatan literasi politik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, upaya memperkuat kewenangan Bawaslu tidak hanya berfokus pada dimensi hukum, tetapi juga pada aspek implementasi yang mencakup pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran secara komprehensif. Langkah ini penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan mendukung kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Prayogo, 'Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11.3 (2022)
- Bakhrul Amal, 'Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018)', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.3 (2019)
- Diding Rahmat and Anthon Fathanudien, "Law Enforcement of Election Crimes in Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i2.5074>.
- Dwi Irawan, I Gusti Agung Ngurah Agung, and Resi Pranacitra, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum," *POSTULAT* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460>.
- Faramadinah Rahmiz and H. M. Yasin, 'Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24.1 (2021)
- H.M. Wasikin Marzuki, 'Problematika Sdm Pengawas Pemilu Dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024', *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2.1 (2022)
- Hendra Setyadi Kurnia Putra, "GRAND DESIGN PERADILAN KHUSUS PEMILU DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.3109>.
- Ida Farida, "MAHAR POLITIK DALAM PANDANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2137>.
- Jonasmer; Muhammad Subekhan Simatupang, "Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Unnes* 4, no. 3 (2018).
- Juhardin Juhardin and Adhe Ismail Ananda, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i1.908>.
- Khoiril Padilah and Irwansyah Irwansyah, "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29210/1202322821>.
- Kholida Qothrunnada, "Good Governance : Pengertian Dan Prinsip-Prinsipnya," web page, 2021.
- La Ode Hamzah, Ali Rizky, and Kamaruddin, "TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA," *Journal Publicuho* 6, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342>.

- Noory Okthariza, "Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State of in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1742957>.
- Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.
- Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Pustaka Pelajar Dan Insict*, 1999.
- S. Dahlberg, "Political Participation and the Welfare State: The Inclusion of Marginalized Groups in Political Processes," *European Journal of Political Research*. 59, no. 2 (2020): 396–411.
- Sainul Rahman, "Tensions of The Tension of Sectarianism and the Challenges of Democracy in the Middle East After Arab Spring," *Jurnal ICMES* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i1.32>.
- Sarah Furqoni, Sahbudi Sahbudi, and Annisa Danti Avrilia Ningrum, 'Politik Hukum Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum', *Jatijajar Law Review*, 1.1 (2022)
- Sofian, "POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PEMILU," *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56854/jhnd.v1i1.43>.
- Surahman Surahman and others, 'Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan', *Jurnal Usm Law Review*, 6.3 (2023),
- Surahman Surahman et al., "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348>.
- Syafrijal Mughni Mada, Firdaus Firdaus, and Mirdedi Mirdedi, 'Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Dan DKPP Dalam Penegakan Hukum Pemilu', *Jurnal Konstitusi*, 19.4 (2022)
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ctk. Kelima, Sinar Grafika., 2014).